

# **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI INDUSTRI KERAJINAN MEBEL UKIR DI KABUPATEN JEPARA**

Oleh:

Fatihatur Rohmania – [Fatihaturromania@gmail.com](mailto:Fatihaturromania@gmail.com)

Drs. Achmad Taufiq, M.Si – [ahmadtaufiqimron@gmail.com](mailto:ahmadtaufiqimron@gmail.com)

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Diponegoro

Jalan Prof. H.Soedharto, S.H, Tembalang, Semarang. Kontak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Industri mebel ukir merupakan salah satu industri yang mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jepara. Hal tersebut dibuktikan jika sebagian besar masyarakat Kabupaten Jepara memproduksi mebel ukir. Namun, dalam beberapa tahun terakhir industri mebel ukir mengalami kemunduran. Adanya hal tersebut dibutuhkan collaborative governance atau kerjasama antar stakeholder untuk menjaga eksistensi industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Sehingga adanya Collaborative tersebut keeksistensian industri mebel ukir dapat dipertahankan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana proses *collaborative governance* dalam mempertahankan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara serta menganalisis tantangan yang dihadapi antar aktor dalam mempertahankan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* serta merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, HIMKI, serta masyarakat yang memiliki industri mebel ukir.

Berdasarkan hasil penelitian *collaborative governance* meliputi 3 tahap yaitu fase mendengarkan, fase dialog, dan fase pilihan. Hubungan antar actor dalam proses collaborative mempunyai hubungan yang baik meskipun antara masyarakat dan HIMKI kurang memiliki hubungan yang erat namun antar aktor dalam melakukan kerjasama berjalan dengan beriringan.

Penelitian ini menyimpulkan jika belum terdapat adanya *collaborative governance* dalam mempertahankan industri mebel ukir di Jepara, namun yang ada masih berupa kerjasama antar aktor atau partnership. Tantangan yang dihadapi para aktor juga merupakan tantangan yang sudah terjadi dari tahun ke tahun namun belum ada penyelesaian yang tepat sehingga tantangan tersebut dapat teratasi. Pemerintah seharusnya mampu memberikan kebijakan yang tepat serta menggandeng masyarakat dan swasta agar hubungan yang dimiliki antar aktor lebih kuat sehingga permasalahan tersebut bisa teratasi dengan baik.

**Kata Kunci : Collaborative Governance, Industri Mebel Ukir, Kabupaten Jepara.**

## PENDAHULUAN

Sektor Industri kerajinan mebel ukir merupakan salah satu industri terbesar yang terdapat di Kabupaten Jepara. Hal itulah yang membuat Kabupaten Jepara dikenal dengan julukan Kota Ukir. Perkembangan industri ukir dari waktu ke waktu semakin membesar dan dikenal oleh banyak daerah. Semakin dikenalnya Jepara dengan kota ukir membuat banyak masyarakat yang berkecimpung dalam industri mebel ukir. Dalam meningkatkan dan mempertahankan eksistensi industri ukir, pemerintah Jepara menerbitkan sebuah peraturan yaitu peraturan daerah No.17 Tahun 2013 mengenai perlindungan industri yang kemudian di perbarui pada UU Nomor 2 Tahun 2014 mengenai perlindungan dan pemberdayaan industri mebel ukir. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah Kabupaten Jepara dengan maksud untuk melindungi keberadaan industri-industri di Jepara, salah satunya yaitu industri mebel ukir.

Industri ukir di Jepara tidak hanya dijadikan sebagai salah satu untuk meningkatkan lapangan

perkerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi industri ukir di Jepara lebih dari itu, yaitu sebagai identitas yang dimiliki oleh kabupaten Jepara sebagai Kota Ukir. Menurut Abdul Kadir (1979) dalam setiawan dan sulaiman (2017:32-33). Jepara yang memiliki julukan sebagai kota ukir sudah menjadi idiom dan sampai menembus pasar ekspor hal tersebut dikarenakan produk mebel ukirnya. Dalam ungkapan “Jepara tak mungkin dipisahkan dari pengertian “kota Jepara” sebagai kota ukir.

Perkembangan industri mebel ukir yang semakin berkembang yang dibarengi dengan banyaknya industri mebel ukir di Kabupaten Jepara tentunya membuat eksistensi industri ukir akan semakin besar. Sehingga dalam mempertahankan eksistensi tersebut kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan peran ketiga aktor tersebut mampu mendongkrak dan mempertahankan eksistensi industri meubel ukir. Kolaborasi ketiga aktor tersebut sering dikenal dengan *Collaborative Governance*.

*Collaborative Governance* merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi-stakeholders dalam urusan-urusan publik. Ada karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi kolaborasi. (Kurniadi, 2020 :38). *Collaborative Governance* memiliki implikasi bahwa semua pihak yang terlibat mempunyai tanggungjawab yang sama untuk keputusan yang diambil. Pemerintah selaku pembuat kebijakan mempunyai peran penting untuk menentukan arah kebijakan dan membuat kebijakan yang baik terkait mempertahankan eksistensi industri ukir kayu di Jepara. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam keberjalananan mempertahankan kerajinan ukir di Jepara.

Namun, saat ini tepatnya dimulai sejak tahun 2018 perkembangan ukir di Jepara sedikit menurun, hal ini dikarenakan generasi muda yang mungkin bisa dikatakan jarang untuk meneruskan usaha ukir yang dikarenakan mereka kurang memiliki pengetahuan

mengenai ukir. Tidak hanya itu, kebijakan dari pemerintah yang kurang dalam menjaga eksistensi perkembangan industri mebel ukir di Jepara membuat banyak masyarakat Jepara justru terjun di pabrik dan mengalami gulung tikar dalam usaha ukir tersebut. Adanya hal tersebut membuat identitas serta budaya yang dimiliki Jepara sebagai kota ukir dapat terancam. Adanya Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk membuat penelitian mengenai bagaimana proses pelaksanaan *collaboative governance* dalam mempertahankan eksistensi industri ukir kayu di Jepara. Serta tantangan apa saja yang dihadapi antar actor dalam mempertahankan eksistensi industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Maka penulis mengambil judul “*Collaborative Governance* dalam Mempertahankan Eksistensi Industri Kerajinan Mebel Ukir Di Kabupaten Jepara”.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan *collaboative governance* dalam mempertahankan eksistensi industri ukir kayu di Jepara. Serta tantangan apa saja yang

dihadapi antar actor dalam mempertahankan eksistensi industri mebel ukir di Kabupaten Jepara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian tersebut diambil melalui wawancara secara langsung dan data dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, HIMKI serta masyarakat desa senenan yang memiliki industri mebel ukir.

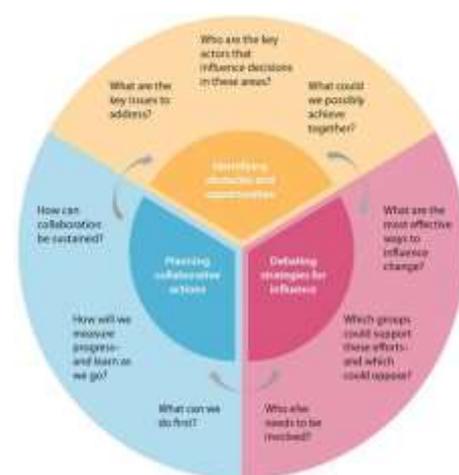
### **Teori Collaborative Governance**

*Collaborative Governance* merupakan suatu Pengaturan pemerintahan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif yang bertujuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan publik serta mengelola program atau aset publik. (Ansell dan Gash, 2007 :2)

Menurut ratner, terdapat Tiga Tahapan di dalam proses

*Collaborative Governance* menurut Ratner(2012 :5) dapat dilihat pada gambar berikut :

**Gambar 1. 1 Tiga Tahap Proses Collaborative Governance dan Action Plannig**



Sumber: Ratner.Collaborative Governance Assesment.Malaysia:CGIAR

Berikut adalah tiga tahapan proses *collaborative governance* dan *action planning*.

1. *Identifying Obstacles and opportunities* (fase mendengarkan)
2. *Debating Strategies for influence* ( Fase Dialog)
3. *Planning Collaborative Actions* (Fase Pilihan)

Dalam pelaksanaan Collaborative Governnace tentunya terdapat beberapa kriteria dalam

keberhasilannya. Menurut Menurut Goldsmith dan Donald (2009: 135-136) terdapat delapan kriteria keberhasilan *collaborative governance* diantaranya yaitu :

1. *Networked Structure*
2. *Commitment to a Common Purpose*
3. *Trust Among The Participants*
4. *Governance*
5. *Access to Authority*
6. *Distributive Accountability atau responsibility*
7. *Information Sharing*
8. *Access to Resources*

### **Proses Pelaksanaan Collaborative Governance dalam Mempertahankan Eksistensi Industri Mebel Ukir Di Kabupaten Jepara**

Industri mebel ukir di Kabupaten Jepara menjadi industri yang paling besar juga sebagai tulang punggung perekonomian daerah di Kabupaten Jepara. Luasnya perkembangan industri mebel ukir sampai di kancah internasional membuat ukir Kabupaten Jepara semakin dikenal dikalangan masyarakat luas. Namun dari tahun

ke tahun produk mebel ukir semakin berkurang eksistensinya, hal tersebut tentunya membuat perkembangan produk industri mebel ukir semakin terhambat. Dalam mempertahankan eksistensi industri mebel ukir tentunya dibutuhkan diperlukan peran serta kerjasama dari berbagai pihak. Kerjasama tersebut meliputi kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta atau yang dikenal dengan istilah Collaborative Governance. Peran dan hubungan antar aktor dalam collaborative governance menjadi langkah dalam meningkatkan eksistensi industri mebel ukir di Kabupaten Jepara.

#### **1. Proses dan Tahapan Collaborative Governance**

Perkembangan industri mebel ukir dari tahun ke tahun tidak selalu mengalami peningkatan bahkan beberapa tahun terakhir banyak pemilik industri mebel ukir yang memilih gulung tikar rumah produksinya, hal tersebut dikarenakan adanya wabah pandemi membuat dampak yang signifikan bagi kelangsungan industri mebel

ukir. Dalam wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, dampak pandemi membuat beberapa masyarakat memilih beralih profesi, hal tersebut dikarenakan sedikitnya pemesanan mebel ukir membuat mereka memilih untuk memberhentikan usaha mebel ukir. Pada tahun 2019 terdapat 4554 pemilik perusahaan mebel namun turun di tahun 2020 menjadi 3438 perusahaan. penurunan yang signifikan terjadi karena dampak dari adanya pandemi.

Perkembangan industri mebel ukir yang semakin menurun eksistensinya membuat berbagai pihak berusaha untuk kembali meningkatkan keeksistensian industri mebel ukir. Penurunan perkembangan mebel ukir diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia ataupun dunia. Melemahnya berbagai sektor khususnya sektor ekonomi membuat hampir seluruh masyarakat mengurangi daya beli mebel ukir, tidak hanya itu kegiatan pasar ekspor juga menjadi salah satu dampak dari adanya pandemi.

Berbagai tindakan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga masyarakat dan pihak swasta.

*Collaborative governance* menjadi sebuah langkah untuk kembali meningkatkan eksistensi industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Peran dari pemerintah dalam hal ini yaitu dinas perindustrian dan perdagangan memiliki andil yang besar dalam perkembangan industri mebel ukir, berbagai kebijakan dikeluarkan untuk bisa memperbaiki tatanan ekonomi utamanya disektor permebelan. Dalam pelaksanaan kolaborasi tersebut, pihak non pemerintah misalnya HIMKI yang merupakan sebuah asosiasi antar pengusaha ukir juga ikut berkontribusi. Serta berbagai masyarakat juga ikut dilibatkan dalam proses kolaborasi.

Pelaksanaan *Collaborative governance* terdapat beberapa proses tahapan. Diantaranya yaitu fase mendengarkan, fase dialog dan fase pilihan . berikut penjelesan proses tahapan antar fase :

**Tahapan pertama** yaitu fase mendengarkan, Dalam fase ini

masing-masing stakeholder mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam industri mebel ukir. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi bahan baku untuk membuat mebel ukir yang semakin sedikit, penjualan ukir yang menurun baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, serta keterampilan ukir yang semakin sedikit dimiliki oleh generasi muda. Beberapa permasalahan tersebut membuat perkembangan ukir semakin menurun dan hal tersebut mempengaruhi dalam keeksistensian industri mebel ukir di Jepara.

Pada tahap pertama kolaborasi terdapat beberapa kriteria yang telah dipenuhi yaitu trust among the participant dan access to authority yaitu kepercayaan dari masing-masing pihak dan prosedur-prosedur yang diterima oleh setiap stakeholder. Dalam hal ini terlihat dari adanya kepercayaan antar stakeholder yaitu antara pemerintah, masyarakat dan HIMKI. Yang turut berpartisipasi dalam memperahankan eksistensi industri mebel ukir. Pada aspek kewenangan juga menunjukkan jika terdapat

adanya aturan yang jelas dan diterima oleh masing-masing stakeholder dalam menjalankan peran sesuai kewenangannya. Sedangkan untuk keenam kriteria lainnya belum terpenuhi.

**Tahapan kedua** yaitu fase dialog. Dalam fase ini masing-masing stakeholder melakukan dialog antar aktor dalam penyelesaian masalah mengenai perkembangan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara. Dialog tersebut ditujukan agar dalam pelaksanaan proses kolaborasi tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan peran masing-masing stakeholder. Dalam hasil penelitian terkait dalam penyelesaian masalah bidang promosi, pemerintah mengadakan dialog saat akan diadakan pameran ataupun mengikuti kegiatan pameran. Dialog tersebut dihadiri oleh HIMKI dan perusahaan yang ingin mengikuti kegiatan pameran.

Pada tahap kedua kolaborasi terdapat beberapa kriteria yang telah dipenuhi yaitu trust among the participant yaitu kepercayaan dari masing-masing pihak dan prosedur-

prosedur yang diterima oleh setiap stakeholder. Dalam hal ini terlihat dari adanya kepercayaan antar stakeholder yaitu antara pemerintah, masyarakat dan HIMKI.

Yang turut berpartisipasi dalam mempertahankan eksistensi industri mebel ukir melalui kegiatan pameran. Pada kriteria *access to authority*, aspek kewenangan juga menunjukkan jika terdapat adanya aturan yang jelas dan diterima oleh masing-masing stakeholder dalam menjalankan peran sesuai kewenangannya. Dan kriteria *information sharing*, dimana masing-masing stakeholder memiliki kemudahan dalam informasi dan terdapat informasi yang jelas bagi masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan pameran ini. Sedangkan untuk kelima kriteria lainnya belum terpenuhi

**Tahapan Ketiga** yaitu fase pilihan. Setelah melalui fase mendengarkan pada tahap pertama dan fase dialog pada tahap kedua, pada tahap ini masing-masing stakeholder melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap

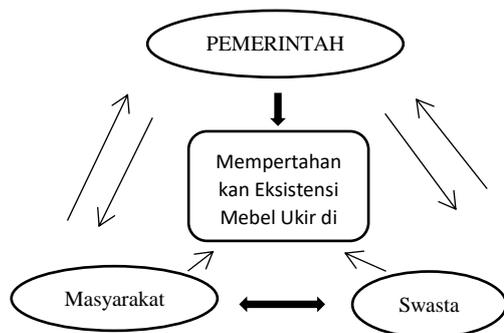
strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya. Seperti pada tahap-tahap sebelumnya, pada tahap ini juga akan dilakukan proses kolaborasi yaitu antar pemerintah, HIMKI dan masyarakat. Program yang akan diimplementasikan yaitu mulai dari pengadaan pameran dan mengikuti pameran di tingkat nasional dan internasional yang akan diikuti oleh perusahaan industri mebel ukir, melakukan kerjasama dengan dinas kehutanan dan daerah lain dalam hal ini yaitu daerah Sulawesi untuk menyelesaikan permasalahan bahan baku kayu dan memperoleh bahan baku yang diinginkan serta yaitu mengadakan pelatihan mengukir untuk memberntuk generasi muda agar memiliki kemampuan mengukir. Sehingga dalam reorganisasi bisa terjadi dengan baik.

Pada tahap terakhir kolaborasi ini, terdapat kriteria yang terpenuhi yaitu *commitment to a Common Purpose* dan *trust among the participant* yaitu kepercayaan dari masing-masing pihak dan prosedur-prosedur yang diterima oleh setiap stakeholder. Dalam hal ini terlihat dari adanya kepercayaan antar stakeholder yaitu

antara pemerintah, masyarakat dan HIMKI. Yang turut berpartisipasi dalam memperahankan eksistensi industri mebel ukir. Pada aspek komitmen juga terdapat komitmen dari masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan program penyelesaian permasalahan mengenai industri mebel ukir tersebut. Sedangkan untuk keenam kriteria lainnya belum terpenuhi.

## 2. Hubungan Antar Aktor dalam Proses Collaborative Governace

Hubungan antar stakeholder dalam pelaksanaan proses kolaborasi tentunya menentukan bagaimana keberhasilan collaborative governance atau justru kegagalan dari proses penerapan collaborative governance dalam mempertahankan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara.



Dalam gambar diatas masing-masing stakeholder memiliki hubungan satu sama lainnya. Hubungan kerjasama pemerintah dan masyarakat yaitu memiliki hubungan yang erat. Hubungan pemerintah dan masyarakat dalam proses kolaborasi dalam mempertahankan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara dapat dilihat dari beberapa hal yaitu *pertama*, pemerintah memiliki kerjasama dengan masyarakat dalam hal ini terkait pemberian pembinaan dari pemerintah kepada masyarakat. Pemberian pembinaan tersebut melalui pelatihan, bantuan alat serta magang.

*Kedua*, Adanya dialog yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terkait mengenai perkembangan mebel ukir di Kabupaten Jepara. Dialog antara kedua belah pihak sendiri merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai salah satu syarat dari adanya *Collaborative Governance*. Dialog pemerintah dan masyarakat sendiri dilaksanakan melalui musrembang, yang mana dalam penyampaian usulan dan keluhan masyarakat

diwakilkan oleh kelompok sentra agar bisa didengar oleh pemerintah.

*Ketiga*, Adanya pelaksanaan pameran produk mebel ukir. Pelaksanaan pameran mebel ukir ini sebagai salah satu bentuk dari pemasaran produk ukir, dimana pemasaran produk ukir tidak hanya dilaksanakan di daerah regional Kabupaten Jepara saja, tetapi juga sampai tahap internasional. Terkait dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini yaitu dimana pemerintah memberikan stand pameran kepada masyarakat pemilik industri mebel ukir yang bersedia untuk mengikuti acara pameran tersebut.

Berikutnya yaitu hubungan kerjasama antara swasta dan pemerintah. Pemerintah dan HIMKI memiliki hubungan yang erat dalam perkembangan industri mebel ukir. HIMKI sendiri merupakan perhimpunan pelaku usaha disektor permebelan dan kerajinan dalam arti seluas-luasnya, menyadari tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan kerjasama yang serasi, mendorong pemerataan

kesempatan berusaha dan ikut serta melaksanakan pembangunan nasional dibidang ekonomi.

HIMKI dan pemerintah bekerja sama sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya itu hubungan kolaborasi pemerintah dan HIMKI dapat dilihat dari banyaknya peran HIMKI dalam membantu pemerintah untuk mensukseskan program-program terkait keberjalanan dalam mempertahankan ekistensi industri mebel ukir.

Dan yang terakhir yaitu hubungan antara HIMKI dan masyarakat. kerjasama masyarakat dan HIMKI saat ini belum terikat erat bahkan bisa dikatakan sifatnya kurang bekerjasama. Hal ini dikarenakan HIMKI merupakan sebuah asosiasi dan bukan seperti lembaga formal sehingga kerjasama dengan masyarakat masih minim. Kerjasama HIMKI dan masyarakat hanya sebatas sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. HIMKI dalam hal ini memiliki tugas untuk masyarakat yaitu memberikan informasi-informasi penting terkait

dengan industri mebel ukir baik itu mengenai promosi, ekspor ataupun mengenai bahan baku pembuatan mebel.

### **Tantangan dalam Mempertahankan Eksistensi Industri Mebel Ukir di Jepara**

Hasil penelitian yang dilakukan kepada masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta HIMKI, terdapat beberapa tantangan yang mampu menghambat perkembangan industri mebel ukir untuk tetap mempertahankan keeksistensinya. Diantaranya yaitu ketersediaan bahan baku, berkurangnya tenaga kerja, terhambatnya ekspor dikarenakan pandemi dan meningkatnya harga kontainer. Berikut penjabaran dari tantangan dalam mempertahankan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara :

#### **1. Ketersediaan Bahan Baku**

Bahan baku menjadi hal yang penting dan pokok dalam keberlangsungan industri mebel ukir. Bahan baku yang dalam hal ini yaitu kayu yang digunakan untuk membuat mebel ukir akan

menghasilkan produk dengan nilai jual tinggi ini memiliki kelangkaan dalam ketersediaannya. Adanya kelangkaan bahan baku membuat bahan baku memiliki harga yang cukup mahal. Kemahalan bahan baku tersebut juga dibarengi dengan kenaikan harga bahan pendukung untuk mebel ukir ukir sendiri. Adanya kenaikan harga baku dan bahan pendukung tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri mebel ukir. Hal tersebut dikarenakan bahan baku yang semakin tinggi sangat berpengaruh terhadap hasil dari mebel ukir.

#### **2. Berkurangnya Tenaga Kerja**

Salah satu faktor penghambat susahny tenaga kerja yaitu adanya pabrik-pabrik industri di Jepara misalnya Pabrik sepatu dan garmen. Adanya pabrik di Jepara yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit membuat sebagian besar masyarakat Jepara memilih untuk bekerja di pabrik. Gaji yang tetap dan tidak sedikit tentunya semakin menjadi alasan pendukung mengapa masyarakat Jepara memilih bekerja di pabrik dari pada di industri mebel.

### 3. Terhambatnya ekspor dan kenaikan harga container

Pandemi Covid-19 menghasilkan dampak yang sangat signifikan dari berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor ekonomi. Menurunnya sektor ekonomi dan adanya PHK secara besar-besaran membuat beberapa masyarakat lebih memilih untuk mengurangi pengeluaran. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap penjualan industri mebel ukir.

**Gambar 3.1 Data Export Furnitur Dari Kayu Kabupaten Jepara Tahun 2019-2020**

Tahun	2019	2020
Jumlah Eksportir	394	381
Jumlah Negara Tujuan	112	92
Volume	52.370.238,74	53.642.569,22
Nilai Ekspor (USD)	186.854.397,15	177.035.721,82

Sumber : Hasil Wawancara DISPERINDAG

Dalam data tersebut terlihat jika jumlah eksportir dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan tersebut awalnya pada tahun 2019 total eksportie 394 dan jumlah negara tujuan 112 mengalami

penurunan pada tahun 2020 yaitu jumlah eksportir menjadi 381 komoditas dan jumlah negara tujuan menjadi 92 negara. Penurunan tersebut merupakan salah satu dari dampak adanya pandemi Covid-19.

Dalam hasil wawancara dengan masyarakat pemilik industri mebel ukir yang juga merupakan kepala bidang sertifikasi dan advokasi menerangkan jika dampak dari adanya pandemi tidak hanya berpengaruh pada ekspor tetapi juga meningkatnya harga container atau kendaraan pengangkut mebel ukir. Di masa pandemi ini harga container meningkat secara signifikan. Kenaikan harga container baik itu alex, tracking, loading ataupun dokumen mengalami kenaikan yang tinggi.

### KESIMPULAN

*Collaborative Governance* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan, akan memperoleh hasil yang maksimal ketika terdapat kerjasama antar aktor didalamnya. Terkait dengan *collaborative*

governance sebagai langkah mempertahankan industri mebel ukir di Kabupaten Jepara belum tercapai dengan baik dan belum mencapai titik *Collaborative Governnace*. Hal tersebut dikarenakan masing-masing aktor hanya saling melakukan peranannya masing-masing tidak terikat serta tidak memiliki hubungan yang erat didalamnya. Hubungan yang dimiliki antar aktor hanya sebatas partnership atau kerjasama biasa tidak mencapai tahap *Collaborative Governance*.

Hubungan antar aktor dalam pelaksanaan kerjasama antar stakeholder antara pemerintah dan HIMKI memiliki hubungan yang erat, meskipun antar HIMKI dan masyarakat masih belum memiliki hubungan yang erat, namun keberadaan dari HIMKI sangat membantu masyarakat. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut masih dikatakan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masing-masing pihak masih tumpang tindih dalam menjalankan peranya.

Terkait dengan tantangan yang dialami ketiga aktor tersebut dalam

mempertahankan eksistensi ini, perlu adanya kerjasama yang kuat dalam keberjalanan industri mebel ukir. Tantangan seperti kurangnya bahan baku kayu menyebabkan meningkatnya harga bahan baku dan harga pendukung dalam proses produksi ukir, tidak hanya itu tenaga kerja yang semakin berkurang tentunya perlu peran yang besar dari pemerintah. Dan tantangan yang terakhit yaitu menurunnya ekspor dan meningkatnya harga container dalam pendistribusian produk ukir tentu juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemilik industri mebel ukir di Kabupaten Jepara.

## **SARAN**

1. Dalam pelaksanaan kerjasama sendiri diperlukan sifat dari ketiga aktor yang memiliki komunikasi yang baik serta tidak adanya dominasi. Hal tersebut dimaksudkan agar proses dari kerjasama tersebut bisa mencapai titik keberhasilan. Tidak hanya itu diperlukan perbaikan hubungan antara pemerintah, masyarakat dan HIMKI agar dalam pelaksanaan proses kerjasama

memiliki hubungan erat dan saling membantu sehingga tahap kerjasama tersebut bias mencapai tahap *Collaborative governance*.

2. Terkait dengan tenaga kerja, masing-masing stakeholder perlu untuk merangsang regenerasi pengukir, sehingga tenaga kerja dalam pengukir tidak berkurang. Tidak hanya itu bagi pemerintah juga perlu mengubah sistem dalam uji sertifikasi pengukir.
3. Terakit dengan bahan baku, pemerintah dan HIMKI perlu untuk memperkuat hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, mislakan dinas lingkungan hidup, dinas kehutanan Kabupaten Jepara serta dengan daerah-daerah lain. Agar pasokan dari bahan baku bisa tersedia dengan baik dengan harga yang bisa ditekan .
4. Terkait dengan menurunnya ekspor pihak pemerintah dan HIMKI bisa memperkuat kerjasama dan kembali menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri yang dulu pernah bekerjasama. Penguatan kerjasama tersebut dibarengi dengan meningkatkan kepercayaan bagi mereka.

Sehingga terdapat hubungan yang baik antara pihak satu dengan yang lain. Dan kembali mendapat kepercayaan untuk melakukan kegiatan ekspor kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti.S.Retno,dkk.2020.*Collaborative Governance dalam Prespektif Administrasi Publik*.Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro: Semarang.
- Fitrah Dan Luthfiyah.2017.*Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*. Jawa Barat: Cv Jejak.
- John D.Donahue And Richard J. Zeckhauser.2011.*Collaborative Governance (Privat Roles For Public Goals In Turbulent Times)*. Princeton University Press : New Jersey.
- Kurniadi.2020.*Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur*.Deepublish : Yogyakarta.
- Ratner.2012. *Collaborative Governance Assesment*. Malaysia:CGIAR.
- Jurnal**
- Ansell, C. Dan Alison G.2007.*Collaborative Governance In Theory And Practice*.**Journal Of Public Administration Research And Theory**.University Of California:Berkeley.
- Darmawanto.2020.*Perancangan Monumen Identitas Kota Jepara Berbasis Ukir Tradisi Menggunakan Metode Black Box*.**Jurnal Seni Kriya**.Vol.8, No.2.
- Irawan, Denny.2017.*Collaborative Governance(Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencerahan udara di Kota Surabaya)*.**Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik**.Vol.5, No.3.
- Muhajirin.2018.*Respon Adaptif Masyarakat Perajin Seni Ukir Jepara*.Disertasi Murdiyani. 2016.*Peran Pemerintah Kabupaten Jepara Dalam Rangka Fasilitasi Terhadap Industri Mebel Dalam Perdagangan Bebas (Studi Kasus Berlangsungnya Acfta)*.Vol 5, No.1.
- Mardiani, Dian.2018.*Landasan Program Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur (LP3A)*. Thesis.
- Setiawan dan Sulaiman.2017.*Pengembangan Desain Motif Ukir Untuk Aktualisasi Identitas Jepara Sebagai Kota Ukir*. **Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia**. Vol 3 No.1.
- Wicaksono, D.Yogi.2015.*Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Dalam Menjaga Eksistensi Industri Kerajinan Kayu Di Kota Ukir*.Vol 5, No.4.

